

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan masyarakat baik yang bersifat natural maupun yang direkayasa, pada hakekatnya merupakan proses perubahan kebudayaan masyarakat tersebut. Perubahan ini meliputi seluruh unsur kebudayaan baik fisik maupun non fisik. Demikian juga perubahan yang dialami masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Hasil dari perubahan itu akan memberikan dampak yang besar, salah satunya berupa perubahan norma budaya masyarakat.

Pergaulan dunia yang semakin cepat memaksa Indonesia untuk mencari format-format baru tentang tata nilai yang dianutnya. Hal ini mengakibatkan nilai-nilai yang sudah ada menjadi mengambang, bahkan menimbulkan krisis nilai budaya yang cukup rumit.

Kondisi ini tentu tidak dikehendaki oleh masyarakat Indonesia, sehingga perlu diupayakan cara agar masyarakat mampu mengikuti perkembangan zaman tetapi tetap berpegang pada budaya yang khas dan bernilai luhur. Artinya tata nilai yang prinsipil tidak terkikis oleh adanya perubahan kebudayaan tersebut

Upaya penanaman dan pewarisan nilai luhur budaya masyarakat Indonesia banyak dibebankan pada dunia pendidikan. Hal ini membawa konsekwensi

terhadap program pendidikan yang menekankan pada penanaman dan pewarisan nilai-nilai budaya bangsa. Seperti apa yang tercantum dalam GBHN tahun 1988: 4 (Tap MPR/No.II/MPR/1988: 6) mengenai pendidikan Nasional, di mana dinyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, tanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani.

Bertolak dari rumusan di atas bahwa untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang bermoral, berdisiplin tinggi dan mempunyai keterampilan, dilaksanakan melalui pendidikan.

Berbicara mengenai manusia yang bermoral, berdisiplin dan terampil, dewasa ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan, terutama masalah moral mendapat perhatian serius dari berbagai pihak, baik di negara maju maupun di negara yang masih berkembang.

Apabila kita kaji lebih jauh mengenai moral ini dari sudut pandang pendidikan, kita telah ketahui bahwa pendidikan bertujuan untuk mencapai kedewasaan, yaitu kedewasaan yang berbentuk integrasi kepribadian secara keseluruhan baik fisik maupun mental. Pendidikan sangat diperlukan dalam upaya mengembangkan manusia-manusia yang bermoral, disiplin tinggi dan mempunyai keterampilan tersebut. Sebagaimana kita ketahui pula bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat, meliputi seluruh tahap perkembangan seseorang, sejak lahir sampai mati.

Dalam setiap tahap perkembangan berlangsung kegiatan belajar yang tertuju kepada pencapaian pertumbuhan yang optimal, yaitu penyempurnaan perkembangan dalam tahap tersebut, serta persiapan untuk tahap berikutnya, sehingga tercapai tingkat hidup pribadi dan sosial yang optimal. Dengan demikian diperlukan adanya kesinambungan antara kegiatan belajar pada satu tahap dengan tahap berikutnya.

Proses belajar seumur hidup itu berlangsung di dalam lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat, oleh karena itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam keluarga, anak mendapatkan pendidikan pada kesempatan yang pertama. Usaha pendidikan, baik pendidikan nilai, moral maupun pendidikan lainnya membutuhkan jalinan kerjasama yang amat erat dari keluarga, sekolah dan masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan nilai merupakan suatu wahana untuk mendewasakan anak agar setiap anak menjunjung tinggi nilai luhur serta moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pendidikan moral salah satunya diberikan melalui mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, mata pelajaran ini wajib dipelajari oleh semua siswa di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Dengan demikian PPKn mengemban tugas yang tidak ringan dalam rangka turut menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas. PPKn merupakan wahana untuk mengembangkan

dan melestarikan nilai luhur, moral dan etika dalam rangka menciptakan manusia yang berbudi luhur.

Manusia berbudi luhur diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, baik sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, warga negara, dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. (Kurikulum SLTP, 1994: 8). Di samping itu PPKn juga diharapkan menjadi wahana membudayakan Pancasila secara dini, terprogram dan terus menerus bagi pembentukan sikap dan perilaku yang didasari nilai luhur Pancasila. Adapun tujuan PPKn di SLTP adalah:

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan, memahami, menghayati, dan meyakini nilai-nilai Pancasila Sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan serta memberi bekal kemampuan untuk belajar lebih baik. (Kurikulum SLTP, 1994: 8)

Perilaku-perilaku yang dimaksud adalah seperti yang di dalam penjelasan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, yaitu:

Perilaku yang mencerminkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dan masyarakat yang beraneka ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan diatasi melalui musyawarah dan mufakat, serta perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam buku *Landasan Operasional Kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Persekolahan PPKn*, A. Kosasih Djahiri (1995: 4), mengatakan bahwa misi utama PPKn adalah sebagai berikut:

Pendidikan Kewarganegaraan yang mampu membentuk manusia Indonesia menjadi warga negara yang berkeperibadian Indonesia, memahami dan meyakini hak, kewajiban dan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Negara sehingga tercipta pola kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan demokratis sebagaimana diharapkan oleh Pancasila dan konstitusi.

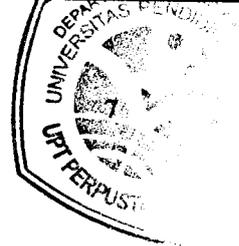
Menyimak tujuan PPKn di SLTP di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila betul-betul dihayati, diamalkan serta menjadi pedoman dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Karena itu Pendidikan Pancasila di persekolahan diharapkan merupakan program inti yang menjiwai seluruh program persekolahan dengan tugas membina, mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu martabat manusia dan kehidupan Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Nasional. PPKn memiliki arti penting dalam rangka pembiasaan dan pembentukan manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, khususnya bagi pembinaan dan pengembangan generasi muda penerus perjuangan bangsa yang bertujuan untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional yang pancasilais.

Sehubungan dengan ini, guru sebagai komponen pelaksana pendidikan mempunyai tanggung jawab besar dalam pencapaian pendidikan secara optimal, karena gurulah yang melaksanakan program pendidikan itu. Seperti pendapat Jorlin Pakpahan dalam analisa Pendidikan (1980: 34),

Dari keseluruhan komponen Pendidikan di sekolah guru merupakan faktor yang terpenting. Bagaimana baiknya komponen pendidikan lainnya di sekolah itu kalau guru sebagai tenaga pelaksana tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik. Sebaliknya bagaimana kekurangan pendidikan lainnya yang tersedia, kalau saja gurunya baik, kita masih dapat mengharapkan hasil yang mendekati baik.

Menyimak pendapat di atas jelas, bahwa guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan sangat menentukan keberhasilan belajar siswa. Dia merupakan orang yang berpengaruh di kelas. Dengan demikian guru merupakan salah satu faktor penting dalam proses belajar mengajar (PBM) di kelas. Kualitas pembelajaran yang baik juga tergantung pola guru, di samping tujuan kurikulum itu sendiri, sebagaimana dikemukakan oleh Anglin (1982: 43) bahwa: "Yang membedakan antara keberhasilan dan kegagalan kelas adalah kualitas interaksi antara guru dan siswa" (Dembo, 1977: 114). Guru tidak hanya berperan menyampaikan pelajaran kepada siswa, tetapi juga memberikan bimbingan, fasilitas dan motivasi kepada siswa dalam proses belajarnya. Rochman Natawidjaja (1993: 9) mengidentifikasi beberapa kemampuan yang diharapkan dikuasai seorang guru yaitu: (1) mampu mengidentifikasi kebutuhan emosional, sosial, jasmaniah dan intelektual siswa, (2) mengidentifikasikan dan mengkhususkan tujuan pengejaran berdasarkan kebutuhan siswa, (3) mengatur lingkungan belajar yang memenuhi kebutuhan siswa yang beragam.

Kemampuan dan keterampilan guru dalam mengolah proses belajar mengajar sangat diharapkan, agar tercapai proses belajar yang lebih efektif.



Guru tersebut mampu melihat, mengkreasikan, membangkitkan motivasi belajar anak, agar kegiatan belajar mengajar berlangsung bermakna bagi siswa. Ini erat kaitannya dengan tugas guru sebagai implementor kurikulum di lapangan. Nana Syaodih Sukamadinata (1988: 218) mengemukakan "implementasi kurikulum hampir seluruhnya tergantung kepada kreativitas, kecakapan, kesungguhan, dan ketekunan guru".

Dengan kata lain betapapun "bagusnya" suatu kurikulum sebagai rencana (termasuk kurikulum PPKn) belum menjamin akan menghasilkan apa yang diharapkan, apabila belum diterapkan. Untuk menerapkannya diperlukan kemampuan dan upaya guru menterjemahkan apa yang menjadi tujuan kurikulum tersebut. Selain itu guru sebagai pengajar mempunyai tugas ganda, selain mengajar ia juga berfungsi sebagai pendidik, mendidik pengembangan moral serta kepribadian anak-anak didik. Dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989 Pasal 3 dan 4 dinyatakan:

Pasal 3: Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan Nasional.

Pasal 4: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Berorientasi dari pernyataan tersebut di atas diharapkan anak didik keiak akan menjadi anggota masyarakat yang memiliki sejumlah bekal baik pengetahuan maupun keterampilan untuk hidup di lingkungan masyarakat yang memiliki aturan-aturan yang harus ditaati.

Atas dasar penjelasan di atas, pendidikan moral pada dasarnya merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan serta kemampuan dasar dan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari dengan perilaku yang memancarkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pendidikan Agama, merupakan pengajaran tentang keyakinan, ibadah dan kajian keagamaan yang menuntut siswa untuk menerapkan dalam kehidupannya sebagai upaya pengembangan dirinya. (<http://www.edgou/Speecher/08-1995/religion:> "Religion Exspression In Public Schools"). Selain itu pendidikan agama sebagai salah satu bentuk untuk mengembangkan kemampuannya dalam meningkatkan pemahaman keagamaan, yakni meningkatkan keiman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jadi dengan demikian sikap keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan acuan moral Pancasila dan moral agama.



Namun kenyataan yang menimpa saat ini terutama anak didik khususnya siswa sekolah lanjutan tingkat pertama yang merupakan harapan bangsa, fenomena yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan perilaku yang menyimpang serta tindakan yang kurang bermoral dari para pelajar, sering dikenal istilah kenakalan remaja dalam berbagai bentuk seperti perkelahian antar pelajar yang dikhawatirkan akan menjurus ke arah tindakan kriminal, sebagaimana diungkapkan oleh Sarlito Wirawan Sarwono (1994: 12) bahwa “ dalam tawuran pelajar, seringkali mereka merusak benda-benda untuk pelayanan umum seperti bis kota, halte, telepon dan sebagainya”, mabuk-mabukan. Mereka juga tak jarang mencederai orang lain (Republika, 23 Agustus 1998: 2). Pada tahun yang sama, banyak pelajar yang melakukan aborsi (naik 300%), dan akhir-akhir ini banyak pelajar yang terlibat obat-obatan baik pil maupun narkoba (Republika, 4 Desember 2000: 2). Padahal kalau dilihat dari hasil ujian (nilai ebtanas murni) untuk mata pelajaran PPKn secara nasional menduduki ranking tertinggi, walaupun dalam tahun ini memang menunjukkan adanya penurunan. Untuk wilayah Kabupaten Sumedang saja, NEM PPKn SLTP Negeri tahun 1999/2000 adalah rata-rata 6,21, sedangkan SLTP swasta adalah 5,69 (Sumber ; Kanwil Depdikbud Jawa Barat, 1999/2000)

Sementara itu banyak penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan pengajaran Pendidikan moral maupun pengaruhnya bagi



siswa hasilnya menunjukkan apa yang dilakukan guru ataupun hasil yang dicapai oleh siswa masih kurang sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Hal itu terungkap dari peneiitian Puspa Djuwita (1993: 13) bahwa: "pola mengajar yang dilakukan guru lebih bersifat pemberian pengetahuan tentang Pancasila dan lebih berorientasi pada pencapaian hasil berupa angka dari pada pembinaan moral"

Hasil penelitian Kadarusmadi (1987: 146) berkenaan dengan pendidikan moral menentukan bahwa kecenderungan-kecenderungan perilaku yang diperlihatkan oleh anak didik, tidak memadai untuk menyatakan bahwa pendidikan moral telah berhasil mengembangkan kemampuan afektif dan kemampuan psikomotorik anak didik. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kecenderungan perilaku anak didik belum mencerminkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai moral.

Selanjutnya Kadarusmadi (1987: 109) menyatakan bahwa:

sasaran atau tujuan PPKn belum dapat mencapai hasil yang memuaskan, sebab hanya 2,85% jawaban peserta didik yang memiliki kecenderungan perilaku yang positif, yaitu kecendungan untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai moral Pancasila, dan sebanyak 1,78% memiliki kecendungan yang negatif, yaitu kecenderungan untuk berperilaku menyimpang dari tuntutan nilai-nilai moral Pancasila.

Selanjutnya dari hasil penelitian Sunarno (1992: 98) menunjukkan bahwa:

- a) PBM belum mencapai tujuan PPKn yang diharapkan, b) guru belum membina dan memendu siswa untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupannya. c)

guru belum membina sikap dan tingkah laku siswa secara nyata sehingga siswa belum tergugah hati nuraninya untuk mengamalkannya.

Dari uraian di atas mengindikasikan tentang pentingnya pendidikan moral bagi kehidupan anak didik. Hal ini dikarenakan pendidikan moral memiliki fungsi untuk menciptakan keharmonisan hubungan sosial, menjamin kebahagiaan rohani dan jasmani manusia, memberikan landasan kesabaran untuk dapat bertahan terhadap naluri dan keinginan nafsu, memberikan daya tahan dalam menunda dorongan rendah yang mengancam harkat dan martabat manusia, memberikan motivasi dalam setiap sikap dan tindakan manusia untuk berbuat kebaikan dan kebijakan yang berdasarkan moral (agama, hukum dan falsafah negara), memberikan wawasan masa depan, baik konsekuensi maupun sanksi sosial (Soeparno, 1992: 23-24).

Berdasarkan uraian di atas, dapat memberikan gambaran betapa pentingnya pendidikan moral bagi kehidupan siswa yang didasarkan atas kurikulum yang ada, tuntutan masyarakat serta berdasarkan teori yang telah tersedia. Artinya moral individu yang dianut oleh anak didik, masyarakat akan ditentukan oleh pergeseran nilai budaya yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Berkenaan dengan itu dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu model pembelajaran pendidikan moral yang didasarkan atas Value Clarification Technique.

B. Masalah

1. Identifikasi

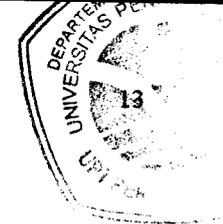
Setiap mata pelajaran dalam kurikulum di Indonesia mengemban misi pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

Pendidikan PPKn mempunyai peranan yang lebih dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, sebab mata pelajaran tersebut secara khusus mengajarkan nilai-nilai dari kelima sila dalam Pancasila agar para siswa dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.

Tiga misi PPKn dikemukakan dalam Buku Rancangan Materi, Metode dan cara Penilaian pendidikan Pancasila dipersekolahan (1994: 20), yaitu:

- a. Sebagai sosok Pendidikan Nilai-Moral dan Norma Pancasila, ia harus mampu menampilkan perangkat tatanan nilai-moral dan norma Pancasila dalam kelima fungsi perannya secara utuh, bulat dan berkesinambungan; dan dia harus mempribadi dalam sistem nilai dan keyakinan peserta didik, menjadi suara hati penuntun sikap berkiprah dalam berbagai kehidupan kini serta kelak kemudian hari.
- b. Sebagai Pendidikan Politik, dia harus mampu membina peserta didik menjadi manusia warganegara Indonesia yang melek politik, yang memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara.
- c. Sebagai Pendidikan keilmuan, membawa konsep, dalil, teori, hukum yang termuat dan tersirat serta berlandaskan Pancasila yang mampu membekali peserta didik ke arah belajar/studi lebih lanjut dalam bidang ilmu yang terkait dengan konsep teori, nilai dan moral Pancasila.

Menyimak tujuan PPKn sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa dengan belajar PPKn siswa diharapkan mempunyai perilaku yang sesuai



dengan nilai-nilai moral Pancasila. Masalahnya sekarang adalah siswa hidup dalam lingkungan yang sangat beragam, banyak hal yang senantiasa berubah dan mempengaruhi perilaku siswa dalam berpikir, menilai, menghargai hidup. Kesemuanya ini dapat berakibat pada terjadinya kekaburan nilai-nilai yang ada dan kekaburan dimensi nilai dalam proses perkembangan dan perubahan masyarakat, maupun dalam pribadi seseorang. Pendidikan, baik pendidikan dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut,.

Keselarasan dan kerjasama antara ketiga lingkungan pendidikan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pembinaan perilaku siswa, sebab seperti dikemukakan oleh Achmad Sanusi (1994: 23) bahwa "perilaku siswa dipengaruhi oleh kehidupan dalam lingkungan keluarga, sekolah (di antaranya PPKn) dan Masyarakat'.

Pendidikan merupakan usaha sadar dan disengaja untuk membimbing anak didik mengembangkan potensinya menuju kedewasaan. Sasaran pendidikan tersebut, berupa peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan kreatifitas dalam proses belajar mengajar, sebagaimana tercantum dalam kurikulum PPKn. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan keputusan tentang Penyempurnaan Kurikulum PPKn Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 979/102/Kep/1/1999. Dalam ketetapan tersebut, dinyatakan dipandang perlu mengadakan penyesuaian

kurikulum PPKn sejalan dengan tuntutan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial budaya.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 2 Tahun 1989 pasal 39 ayat 1 dinyatakan: "Pelaksanaan pendidikan berdasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan"

Ketentuan ini yang kemungkinan mendorong Pemerintah untuk melaksanakan peningkatan mutu pendidikan melalui kurikulum, karena kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturannya mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (Dipdikbud 1994).

Sesuai dengan pandangan kurikulum di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum memiliki dua dimensi pokok: (1) rencana mengenai isi dan bahan pelajaran, dan (2) pedoman yang mengarahkan bagaimana kurikulum dilaksanakan atau diimplementasikan (Nana Syaodih S, 1997:199)

Mengacu kepada tujuan kurikulum yang diharapkan, tentu perubahan nilai moral Pancasila yang terjadi sekarang ini, akan dapat diantisipasi oleh pendidikan. Pendidikan memberikan antisipasi kepada perubahan nilai-nilai moral Pancasila yang lebih baik yang didasarkan kepada pengetahuan, identitas diri, sikap, perilaku dan interaksi antara siswa yang berasal dari berbagai macam latar belakangnya, sifat, kemampuan.

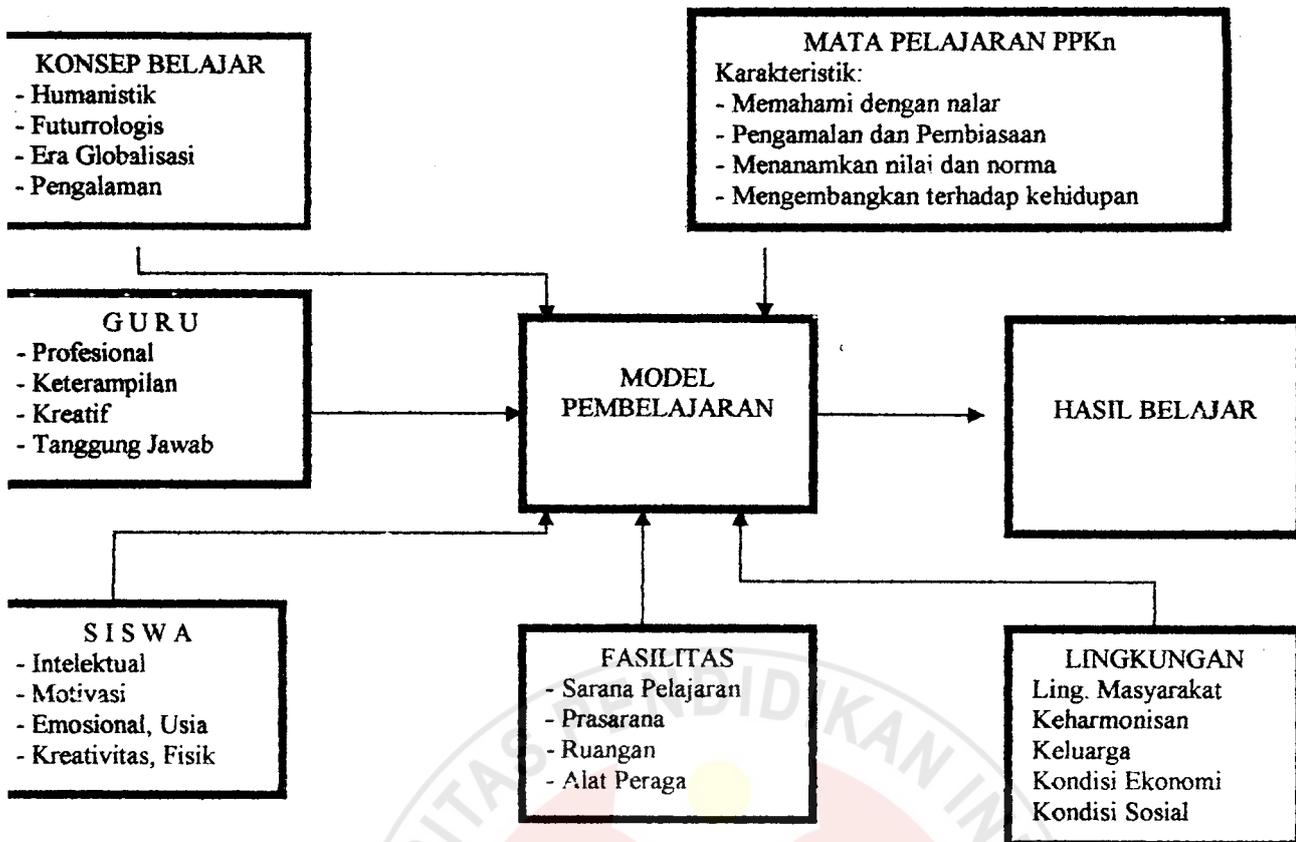
Maka itu kurikulum sebagai pedoman dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta kurikulum hendaknya mampu menggambarkan tuntutan perkembangan peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik merupakan elemen penting dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Romberg, menyatakan bahwa tujuan "kurikulum sebagai sekumpulan rencana belajar yang diharapkan dan perencanaan operasional bagi pencapaian belajar tersebut". Kurikulum merupakan rencana yang lengkap dengan tujuan-tujuan, metode-metode dan kegiatan-kegiatan.

Tujuan kurikulum seperti ini secara sadar atau tidak memberikan tuntutan kepada pengelola pendidikan untuk mampu dan sadar akan pentingnya memperhatikan kebutuhan peserta didik sebagai pengguna layanan pendidikan dalam penerapan kurikulum yang akan disampaikan kepada mereka.

Guna mewujudkan harapan tersebut, sekolah hendaknya mampu merencanakan suatu model pembelajaran yang dapat mengakomodasi harapan peserta didik tersebut. Model pembelajaran yang dimaksudkan di sini adalah model pembelajaran yang mampu memberikan nilai-nilai moral Pancasila yang akan diajarkan kepada peserta didik dengan harapan dapat memperkaya, memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan serta mengembangkan nilai, sikap dalam rangka penerapan pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka pelajari dari mata pelajaran PPKn. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Nana Syaodih S. (1999: 161) pemilihan

model akan sangat didasarkan atas kelebihan dan kebaikan-kebaikan serta kemungkinan pencapai hasil yang optimal, tetapi perlu disesuaikan dengan sistem pendidikan mana yang digunakan. Artinya bahwa pengembangan model pembelajaran akan sangat ditentukan oleh adanya sistem pendidikan yang berlaku.

Pengembangan model pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan bersangkutan paut dengan pengembangan model pembelajaran VCT . Dasar pertimbangan dilaksanakan penelitian ini adalah berkaitan dengan perubahan nilai-nilai Pancasila dalam budaya masyarakat yang secara langsung atau tidak memberikan pengaruh kepada nilai, moral serta perilaku siswa. Di mana dalam perubahan nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai dengan budaya akan terjadi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu proses perubahan sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu melalui penelitian model pembelajaran VCT akan diketahui nilai, moral dan norma yang sesuai dengan moral dan kebudayaan masyarakat. Untuk lebih mudah memahami alur atau konsep berpikir dalam pengembangan variabel penelitian, dapat dilihat dalam kerangka berpikir pada bagan 1.1.



Bagan 1.1
Peta Variabel Teoritis

2. Perumusan Masalah

Secara lebih makro, era globalisasi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, membawa dampak adanya perubahan-perubahan tata nilai kehidupan masyarakat yang tampak lebih mementingkan diri sendiri serta berperilaku egois. Dari sinilah muncul permasalahan yang menjadi dasar timbulnya gagasan untuk memberikan pengajaran nilai yaitu bermuara pada pendidikan nilai melalui mata pelajaran PPKn.

Dengan demikian, pelaksanaan proses belajar mengajar PPKn sebagai salah satu bentuk pendidikan nilai di sekolah khususnya perlu dikaji

kembali, tidak hanya menekankan pada nilai-nilai Pancasila semata, tetapi lebih menitik beratkan pada pengembangan sikap serta perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya untuk mengkaji kembali pelaksanaan pengajaran PPKn di sekolah semakin mendesak apabila dikaitkan dengan adanya krisis-krisis yang terjadi akibat perubahan-perubahan secara pesat yang menyangkut seluruh tata kehidupan manusia saat ini, yang ditandai munculnya konflik-konflik, ketegangan maupun hilangnya keseimbangan dalam kehidupan manusia, telah pula merubah tidak saja pada kebiasaan dan tingkah laku manusia, tetapi juga pada moral yang mendasarinya. Melalui pendidikan moral yang diselenggarakan di sekolah dengan baik, diharapkan para siswa akan mampu menangkal nilai budaya negatif yang terlihat sedang berkembang saat ini. Budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila ini adalah terjadinya budaya main hakim sendiri, tawuran dan perbuatan negatif lainnya yang cenderung mengabaikan nilai-moral yang dianut bangsa Indonesia.

Pendidikan moral sebagai bagian integral dari pendidikan nasional merupakan : "suatu usaha yang secara sadar dilakukan guru untuk mempengaruhi siswa dalam rangka pembentukan manusia berpancasila". Adapun tujuan pengajaran PPKn kelas 2 SLTP sebagaimana disebutkan di dalam GBPP PPKn SLTP (1994: 4), adalah sebagai berikut, siswa mampu:

- a. mengemukakan tanggapan/penilaian secara nalar tentang sikap perilaku yang ada dan seharusnya ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Memberikan klarifikasi nilai-moral daripada sejumlah keadaan dan kejadian yang terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- C. Mengamalkan sejumlah sikap perilaku terpuji dan sesuai dengan nilai moral yang berlaku dalam kehidupan negara Republik Indonesia.

Begitu juga Nasution (1989: 141) menyatakan bahwa: Perubahan kepercayaan (yang akan menimbulkan juga perubahan dalam sikap, nilai-nilai dan akhirnya kelakuan) terjadi akibat interaksi dengan lingkungan dan adanya informasi baru. Perubahan tersebut terjadi melalui: kelima dasar-dasar Pancasila. Selanjutnya dikatakan:

Tiap guru bertanggung jawab membantu siswa agar ia tumbuh dan berkembang, agar kelakuannya berubah dalam dimensi-dimensi yang digariskan dalam moral. Tujuan moral sangat esensial bagi hidup setiap individu agar hidup harmonis dalam masyarakat dan karena itu tujuan tersebut harus mempunyai tempat yang sentral dalam kurikulum dan disain instruksional pada semua tingkatan pendidikan. Hanya dengan cara demikian siswa akan dapat mengubah kelakuannya agar menjadi warga negara yang efektif dan produktif.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu model pengajaran pendidikan moral yang didasarkan pada pengembangan model pembelajaran VCT, gambaran tersebut memperlihatkan bahwa proses pendidikan dipengaruhi oleh adanya berbagai kondisi kultural dan kondisi sosial yang menyangkut norma, nilai-nilai serta peraturan atau undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah.

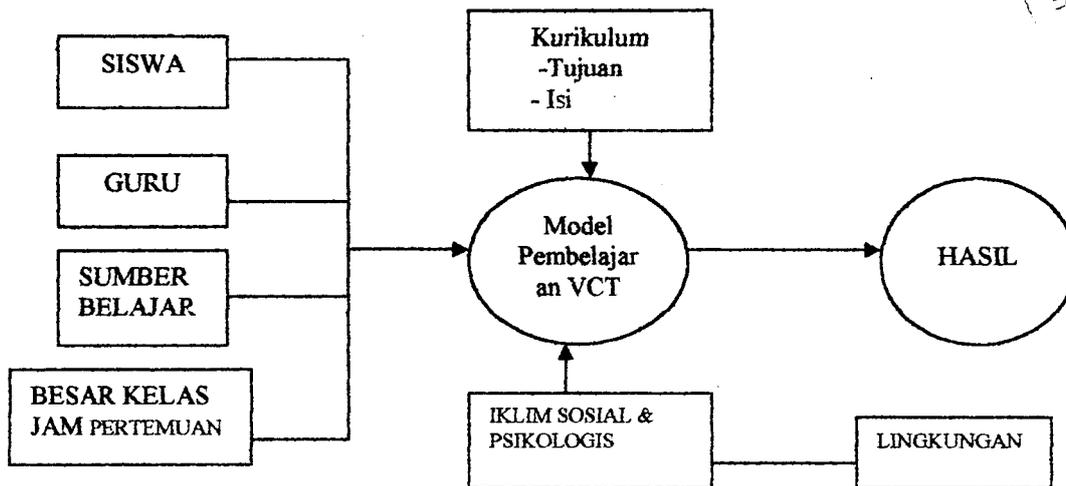
Uraian di atas, memberikan rujukan bahwa pengembangan model pembelajaran VCT hendaknya mampu mengacu kepada berbagai permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan fenomena di atas, maka fokus penelitian yang akan dijadikan masalah dalam penelitian ini berkenaan dengan “pengembangan model pembelajaran VCT PPKn di kelas 2 SLTP Negeri Kabupaten Sumedang”

Mengacu kepada rumusan masalah umum tersebut secara operasional dapat dijabarkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran umum kurikulum PPKn yang sarat nilai - moral dalam pembelajaran pada saat ini ?
2. Model pembelajaran pendidikan moral seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan siswa guna mengantisipasi pergeseran nilai ?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh guru (sekolah) dalam mengimplementasikan model pembelajaran VCT PPKn yang cocok di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ?

Untuk mempermudah pemahaman dalam menelaah penelitian yang akan dilakukan dapat dilihat seperti pada bagan 1.2 berikut.



Bagan 1.2
Peta Variabel yang Terlibat Dalam Pembelajaran Pendidikan Moral

3. Definisi Operasional

Penelitian ini dimaksudkan guna pengembangan model pembelajaran VCT dalam pengembangan nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan. Berkenaan dengan ini, untuk menghindari kesalahan dalam pengertian, perlu dijelaskan batasan ruang lingkup penelitian ini yang berkaitan dengan variabel penelitian, sehingga dapat diperoleh sasaran yang jelas dalam penelitian ini. Seperti pendapat Tuchman (1975: 79) tentang definisi operasional yaitu "An operational definition based on observable characteristics of that which's in being defined ". Sedangkan pengertian model pembelajaran dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Saripuddin dan Toeti (1994: 78) yang mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur pengorganisasian pengalaman belajar

secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Model VCT menjadi penekanan dalam model pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dengan model VCT di sini adalah proses belajar mengajar yang dapat menerapkan model informasi yang tepat, sehingga menghasilkan suatu jenis perbuatan yang berguna bagi siswa sehingga mampu menentukan diri mereka sendiri secara lebih berguna. Suwarma Al Mukhtar, menjelaskan bahwa model merupakan suatu kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan.

VCT (Value Clarification Technique), menurut Cheppy, (1988: 29) "Pendekatan ini (klarifikasi nilai) membantu subyek didik menentukan dan menguasai nilai-nilai mereka sehingga mampu menentukan diri mereka sendiri secara lebih berarti dan pasti"

"Essensi diperlukan pendidikan nilai supaya apa yang menjadi milik potensial manusia selalu terbina berkembang, manusia memiliki *beliefs* dan *value system* di mana berbagai nilai moral terpadu menjadi *organized value* berminifestasi menjadi *virtual and based of culture society, institution and person*". (Milton Rokeah, yang dikutip A. Kosasih Djahiri, 1996: 4).

Pendidikan moral menurut Nasution (1989: 132) berkenaan dengan pertanyaan yang benar dan salah dalam hubungan inter-personal, antara manusia dengan manusia lainnya, yang meliputi konsep-konsep seperti harkat manusia, harga diri manusia, kepedulian terhadap manusia, sikap saling menghargai, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud VCT dalam penelitian ini adalah suatu metode, teknik atau strategi pengajaran afektif di mana siswa di tuntut untuk mengungkapkan, menemukan dan menghargai nilai mereka sendiri maupun nilai-nilai yang diberikan oleh gurunya di dalam kelas maupun di luar kelas.

Dengan menggunakan Pola PVCT mampu mendengarkan isi pesan dan moral serta jiwa semangat yang tersirat dan tersurat dalam suatu kajian pelajaran, serta mengajak kita (khususnya siswa) bertamasya ke alam hakekat isi pesan nilai dan moral secara multi dimensional serta mencoba mencari landasan moral dan tuntutan moral.

Dengan PVCT siswa dibina dan diberi pengalaman belajar serta ditingkatkan potensi afektualnya sehingga memiliki kepekaan dalam berbagai landasan dan tuntutan nilai moral kehidupan. (A. Kosasih Djahiri, 1996: 65)

PPKn adalah upaya membina, menanamkan dan meningkatkan moralitas seseorang atau moralitas masyarakat berdasarkan suatu tuntutan moral dilingkungan hidupnya, ini berarti bahwa nilai moral pencasila yang tadinya bersifat moral umum melalui pendidikan PPKn akan menjadi moralitas, kemudian menjadi sikap, keyakinan, dan akhirnya menjadi nilai yang menyatu dengan nilai lain yang telah ada dalam dirinya, nilai tersebut akan menjadi dasar dan arah dalam kehidupannya. (A. Azis Wahab, 1988: 47)

Dari pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan PPKn dalam penelitian ini adalah upaya guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang berkaitan dengan mata pelajaran PPKn.

4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model pembelajaran VCT yang menekankan pada nilai-nilai serta moral budaya yang lebih baik yang di dasarkan pada perilaku kehidupan sehari-hari, hal ini dikarenakan pendidikan nilai, moral memberikan bekal kepada siswa untuk mampu hidup dalam dunia nyata di lingkungan masyarakatnya. Dengan gambaran tersebut dapat dijadikan untuk memperbaiki arah sistem pengajaran terutama yang berkenaan dengan pelaksanaan model pembelajaran VCT di tingkat SLTP. Sehubungan dengan tujuan tersebut secara spesifik diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai terjadinya krisis moral. Melalui pemahaman tersebut, diharapkan akan memperoleh gambaran yang dapat dijadikan acuan dasar yang menyangkut nilai-nilai moral yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini
- (2) Untuk mengetahui rumusan model pembelajaran VCT yang sesuai dengan kebutuhan siswa, sehubungan terjadinya pergeseran nilai dalam perilaku sehari-hari

(3) Untuk mengetahui pemahaman guru mengenai upaya-upaya dalam mengimplementasikan model pembelajaran serta mengantisipasi terjadinya pergeseran nilai – nilai budaya yang memungkinkan memberikan dampak terhadap nilai – moral siswa yang sedang berkembang pada saat sekarang.

Dari uraian tersebut dapat dideskripsikan dan dianalisis, ini akan memperoleh gambaran bagaimana pengembangan model pembelajaran VCT PPKn tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap siswa, artinya siswa dapat memperoleh nilai luhur dan moral yang dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari baik di kelas/sekolah, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil dan analisis, kemudian dicoba untuk memberi saran atau rekomendasi dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengajaran PPKn melalui metode VCT dan meningkatkan nilai luhur serta moral yang berakar pada budaya bangsa dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari.

5. Manfaat Penelitian

Melalui pengakajian konseptual maupun temuan-temuan otentik di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan pemikiran yang bermanfaat bagi para pengelola pendidikan, baik itu Kepala sekolah, guru maupun pengelola pendidikan lainnya yang sedang berjalan saat ini. Dari hasil penelitian diharapkan dapat diperoleh suatu model pembelajaran VCT yang dirasa mampu memberikan rambu-rambu dalam

menangkal terjadinya krisis moral yang berkaitan dengan terjadinya kekaburan nilai-nilai yang ada dan kekaburan dimensi nilai yang sebenarnya.

- a). Temuan penelitian ini, secara teoritis dapat bermanfaat memberikan sumbangan masukan berupa prinsip bagi peningkatan kualitas pelaksanaan model pembelajaran
- b). Hasil penelitian ini diharapkan pula, bagi penulis dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pembinaan profesi penulis (guru) dalam upaya peningkatan pemahaman penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam pengajaran PPKn, serta untuk lebih memantapkan wawasan dan pengalaman menuju peningkatan kualitas diri.
- c). Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan dasar bagi guru-guru untuk lebih memahami dalam upaya pembinaan kedisiplinan anak baik terhadap nilai-moral-norma yang berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Di samping itu bagi orang tua, pendidik lainnya dalam upaya membina anak-anak didik mereka menjadi anak-anak yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi terhadap nilai moral yang berlaku, sehingga terciptalah diri anak sebagai warga negara yang baik.

